

**ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM LOMBA DESA
DAN KELURAHAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Dalam Memenuhi Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

M. Age Bagaskoro
NIM. 07011381823125

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Age Bagaskoro

NIM : 07011381823125

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 26 Juni 2023



M. Age Bagaskoro
NIM. 07011381823125

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM LOMBA DESA DAN
KELURAHAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**M. Age Bagaskoro
NIM. 07011381823125**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2023

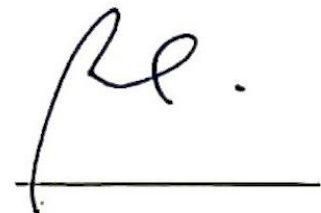
Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003**

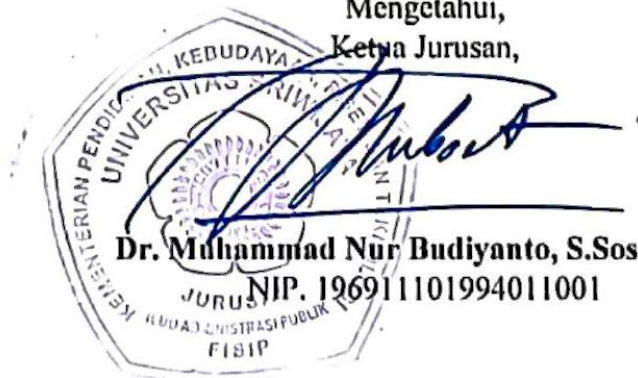


Pembimbing II

**Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

ANALISIS PENGELOLAAN PROGRAM LOMBA DESA DAN KELURAHAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

M. Age Bagaskoro
07011381823125

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Juli 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003
Pembimbing I

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009
Pembimbing II

Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002
Penguji I


Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si
NIP. 198801272019031005
Penguji II



Mengetahui,



Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu membuat hidup menjadi mudah. Seni membuat hidup menjadi indah. Iman membuat hidup menjadi terarah”

(Anwar Fuady)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua Penulis (**Bambang Harmanto dan Lisma Peni, S.Sos., MM**) sebagai motivasi dalam menjalani hidup dan selalu memberikan semangat, baik dari segi materil maupu moril;
2. Adik-adik Penulis (**Broni & Chiko**) yang selalu memberikan semangat dan senyuman;
3. Rekan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2018 (**M. Firdaus Febriansyah, S.A.P.**) yang selalu memberikan masukan dan saran;
4. Apresiasi untuk diri Penulis sendiri.

ABSTRACK

The purpose of this research is to find out and be able to describe how the village and urban village competition program is managed based on the theory of Stephen P. Robbins and Mary Coulter. This research uses a qualitative approach through the collection of interview data, documentation, and field observations. The results showed that the village and sub-district competition program management was good. Planning includes defining goals that are already known by implementers, establishing strategies through the establishment of terms of reference and evaluation teams for village and sub-district competitions, and developing plans through meetings. Organizing, which includes the division of tasks and placement of employees, has been carried out based on structural position levels but has not yet involved other agencies that should be involved in activities. Leadership includes giving directions so that executors carry out their duties and functions according to their duties and functions through oral and written communication, but program implementers have not been given special honorariums. Control, which includes monitoring, has been carried out before and when the program is implemented, and an assessment is carried out based on the assessment format stipulated in the regulations, making corrections in order to re-ensure the assessment that has been carried out so that mistakes do not occur. Therefore, it is better for agencies to make improvements in the organizational dimension, especially in the indicators of division of tasks and employee placement, so that other agencies are involved in the evaluation team for village and sub-district competitions. As well as making improvements to the dimensions of leadership to be precise in providing motivation so as to increase motivation for all members of the assessment team in managing and succeeding the village and sub-district competition program at the South Sumatra Province level.

Keywords: Management, Village and Sub-District Competition, South Sumatra Province

ADVISOR I



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.
NIP. 195811191985031003

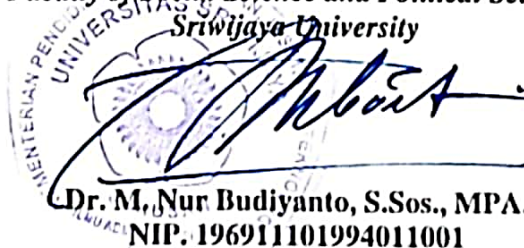
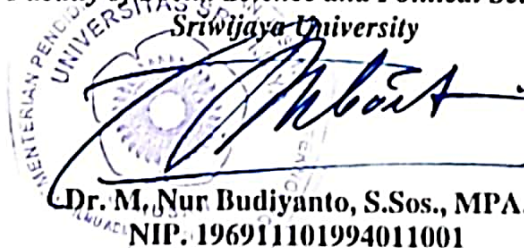
ADVISOR II



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Palembang, July 2023

**Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan Bagaimana Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan berdasarkan teori dari Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data wawancara, dokumentasi serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program lomba desa dan kelurahan sudah baik. Perencanaan yang meliputi pendefinisian tujuan yang sudah diketahui oleh para pelaksana, penetapan strategi melalui pembentukan kerangka acuan kerja dan tim penilai lomba desa dan kelurahan serta pengembangan rencana melalui rapat. Pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas dan penempatan kerja pegawai sudah dilakukan berdasarkan jenjang jabatan struktural, namun belum melibatkan instansi lain yang seharusnya dilibatkan dalam kegiatan. Kepemimpinan meliputi pemberian arahan agar pelaksana menjalankan sesuai tugas dan fungsi melalui komunikasi lisan maupun tertulis, namun para pelaksana program belum diberikan honor khusus. Pengendalian yang meliputi pemantauan sudah dilakukan sebelum dan saat program dilaksanakan, dan dilakukan penilaian berdasarkan format penilaian yang diatur didalam peraturan serta melakukan pengkoreksian dalam rangka memastikan kembali penilaian yang sudah dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan. Oleh karena itu sebaiknya instansi melakukan perbaikan pada dimensi pengorganisasian khususnya pada indikator pembagian tugas dan penempatan kerja pegawai agar melibatkan instansi lain dalam tim penilaian lomba desa dan kelurahan. Serta melakukan perbaikan pada dimensi kepemimpinan tepatnya pada pemberian motivasi agar dapat meningkatkan motivasi bagi semua anggota tim penilai dalam mengelola dan menyukseskan program lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Lomba Desa dan Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.
NIP. 195811191985031003

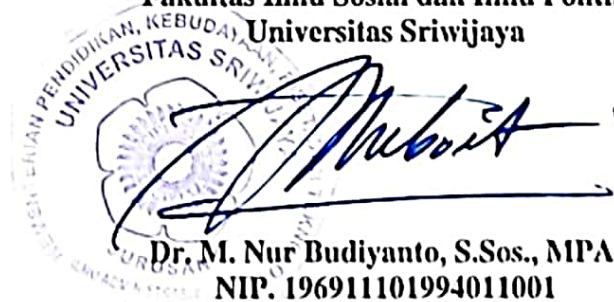
PEMBIMBING II



Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Palembang, Juli 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan**”. Penulis menyadari bahwa tentunya tidak akan mungkin skripsi ini dapat terselesaikan tanpa adanya peran, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bambang Harmanto dan Lisma Peni, S.Sos., MM. atas segala doa, nasihat, bimbingan dan dukungan baik dari segi material maupun moril kepada penulis, serta kepada adik-adik penulis Broni dan Chiko yang selalu memberikan semangat, menghibur dan dukungan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM. selaku dosen pembimbing Skripsi I yang telah membimbing kepada penulis guna penyelesaian dalam menyusun Skripsi.
5. Junaidi, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bantuan, arahan, saran, masukan dan bimbingan kepada penulis guna penyelesaian dalam menyusun Skripsi ini.
6. Drs. Gatot Budiarto, MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Manajemen Sektor Publik.
7. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Palembang.
8. Drs. Nelson Firdaus, MM. selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerima peneliti dalam memberikan izin penelitian Skripsi.
9. Drs. Uzirman Irwandi, MM. selaku Sekretaris Dinas PMD Prov. Sumsel yang telah memberikan bantuan ke penulis.
10. Rika Aprilisna, ST., M.Si. selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa yang telah memberikan bantuan ke penulis.
11. Febriani, SSTP., M.Si. selaku Kepala Seksi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa yang telah memberikan bantuan ke penulis.
12. M. Firdaus Febriansyah, S.A.P. yang telah membantu memberikan masukan dan saran.

Dengan selesainya Skripsi ini, maka penulis berharap dapat berguna bagi akademik serta bagi masyarakat dalam mengetahui permasalahan yang telah terjadi lalu dengan ditemukan penyelesaiannya dengan konsep Manajemen Sektor Publik.

Palembang, Juli 2023

Penulis,
M. Age Bagaskoro

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACK</i>.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	13
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Konsep Manajemen.....	15
2.1.2 Model Fungsi-Fungsi Manajemen.....	15
2.1.3 Definisi Pengelolaan.....	20
2.1.4 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi.....	20
2.2 Teori yang Digunakan	24
2.3 Kerangka Teori.....	26
2.4 Kerangka Berpikir	29
2.5 Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Definisi Konsep.....	42

3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Informan Penelitian	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data	48
3.8 Jadwal Penelitian	51
3.9 Sistematika Penulisan	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum DPMD Provinsi Sumatera Selatan	53
4.2 Hasil Penelitian	58
4.2.1 Perencanaan (<i>Planning</i>)	58
4.2.2 Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	68
4.2.3 Kepemimpinan (<i>Leading</i>)	72
4.2.4 Pengendalian (<i>Controlling</i>)	80
4.3 Hasil Pembahasan	92
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Sumatera Selatan Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	2
Tabel 2. Daftar Kabupaten / Kota Peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.....	7
Tabel 3. Daftar Kabupaten / Kota Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.....	8
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 5. Fokus Penelitian.....	43
Tabel 6. Jadwal Penelitian.....	51
Tabel 7. Matriks Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Lomba Desa dan Kelurahan di Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Regional	22
Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian	30
Gambar 3. Teknik Analisis Data Miles & Huberman.....	49
Gambar 4. Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	54
Gambar 5. Logo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	54
Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan	57
Gambar 7. Tujuan LomDesKel dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015.....	61
Gambar 8. Tujuan LomDesKel dalam Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021	61
Gambar 9. Kerangka Acuan Kerja Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan	64
Gambar 10. SK Gubernur Sumsel tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan.....	65
Gambar 11. Rapat Tim Lomba Desa dan Kelurahan	67
Gambar 12. Pembentukan dan Tugas Tim Penilai Pada SK Gubernur Sumsel.....	70
Gambar 13. Lampiran SK. Gubernur Sumsel tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan.....	70
Gambar 14. Pemberian Arahan Kepala Dinas	74
Gambar 15. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023	76
Gambar 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan	79
Gambar 17. Rapat Intern Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan.....	82
Gambar 18. Pemantauan Kegiatan Lapangan	83
Gambar 19. Lampiran I, II & III Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	85

Gambar 20. Rapat Pleno Evaluasi dan Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumsel	88
Gambar 21. Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumsel	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	105
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing I	106
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing II	107
Lampiran 4. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi	108
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I	109
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II	110
Lampiran 7. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	112
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan	113
Lampiran 9. Surat Balasan Izin Penelitian Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan	114
Lampiran 10. Pedoman Wawancara	115
Lampiran 11. Tabel Matriks Wawancara	117
Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian	137
Lampiran 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	138

DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
Destana	: Desa Tangguh Bencana
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
EPDesKel	: Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Kabid	: Kepala Bidang
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
Kasi	: Kepala Seksi
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
LomDesKel	: Lomba Desa dan Kelurahan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenkeu	: Peraturan Menteri Keuangan
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
RKPDesa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
Sumsel	: Sumatera Selatan
TP. PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UPK	: Unit Pengelola Keuangan

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan salah satu agenda pembangunan menyeluruh yang tertuang pada dokumen yang judul “*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*” atau Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan isi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku di tahun 2016 hingga tahun 2030 (Panuluh & Fitri, 2016). SDGs sendiri berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali, baik itu negara maju, negara berkembang ataupun negara kurang berkembang semua memiliki kewajiban untuk menjalankan dan mencapai tujuan dari SDGs itu sendiri.

Terdapat 17 tujuan yang tertuang pada SDGs itu sendiri diantaranya (1) Menghapus Kemiskinan; (2) Mengakhiri Kelaparan; (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan Bermutu; (5) Kesetaraan Gender; (6) Akses Air Bersih dan Sanitasi; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Infrastruktur, Industri dan Inovasi; (10) Mengurangi Ketimpangan; (11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Menjaga Ekosistem Laut; (15) Menjaga Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar yang membentang di antara ribuan pulau dari Sabang sampai dengan Merauke yang terdiri dari 37 Provinsi. Berdasarkan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

2014), tepatnya pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Hal ini menunjukkan bahwa begitu luas dan besarnya wilayah Indonesia yang tidak dapat dipenuhi dan dijalankan sendiri oleh Pemerintah Pusat dalam membangun wilayah yang ada di dalamnya. Kondisi inilah yang menjadi tugas utama Pemerintah Daerah agar dapat menjalankan sebagian program Pemerintah Pusat dalam membangun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dari begitu banyak dan luasnya wilayah yang ada di Indonesia, tentu masih adanya wilayah yang masih tertinggal seperti daerah pedesaan dan kelurahan.

Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sendiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di tahun 2019 dan 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Sumatera Selatan Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Ogan Komering Ulu	13	157
2.	Ogan Komering Ilir	18	327
3.	Muara Enim	22	256
4.	Lahat	24	377
5.	Musi Rawas	14	199
6.	Musi Banyuasin	15	243
7.	Banyuasin	21	305
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	19	259
9.	Ogan Komering Ulu Timur	20	332

10.	Ogan Ilir	16	241
11.	Empat Lawang	10	156
12.	Pali	5	97
13.	Musi Rawas Utara	7	89
14.	Palembang	18	107
15.	Prabumulih	6	37
16.	Pagar Alam	5	35
17.	Lubuk Linggau	8	72
Sumatera Selatan		241	3.289

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dari tabel 1 dapat menjelaskan sedikit informasi mengenai jumlah Desa dan Kelurahan di setiap Kecamatan dari 13 Kabupaten dan 4 Kota di Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam membangun dan meningkatkan perkembangan desa dan kelurahan khususnya di Sumatera Selatan masih harus dilakukan demi perkembangan desa dan kelurahan yang lebih baik kedepannya.

Status desa diklasifikasikan berdasarkan 5 (lima) kategori, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa cepat berkembang (maju) dan desa mandiri. Pada umumnya desa masih jauh tertinggal di bandingkan dengan perkotaan baik dari segi kesejahteraan masyarakat, sumber daya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, inovasi, hingga fasilitas-fasilitas yang ada. Salah satu penyebab mengapa desa lebih tertinggal dibandingkan perkotaan ialah kurangnya peran dari pemerintah, baik itu peran dari pemerintah Kabupaten Kota, pemerintah Provinsi bahkan peran dari pemerintah Pusat. Akibatnya adalah berdampak pada terhambatnya pembangunan yang ada di pedesaan. Bahkan menurut Hari Prayitno dalam (Anggraini & Lisdiana, 2020) mengatakan bahwa belum semua hasil-hasil kemajuan pembangunan dapat

dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terlebih lagi penduduk yang ada di daerah pedesaan yang hidupnya di daerah-daerah terpencil bahkan di pedalaman.

Kegiatan program lomba desa dan kelurahan atau sering disingkat LomDesKel melaksanakan perlombaan yang berdasarkan atas tiga bidang, seperti Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan. Untuk Bidang Pemerintahan sendiri terdiri dari aspek Pemerintahan; kinerja; inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat; desa dan kelurahan yang berbasis teknologi informasi / *E-Government*; dan pelestarian adat dan budaya.

Kemudian pada Bidang Kewilayahan terdiri dari aspek identitas; batas; inovasi; tanggap dan siaga bencana; dan pengaturan investasi, sedangkan Bidang Kemasyarakatan terdiri dari aspek partisipasi masyarakat; lembaga kemasyarakatan; pemberdayaan kesejahteraan keluarga; keamanan dan ketertiban; pendidikan; kesehatan; ekonomi; penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Pelaksanaan Program Lomba Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang berkembang atau cepat berkembang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Menteri Dalam Negeri RI, 2015). Program Lomba Desa dan Kelurahan sangat berkaitan erat dengan keberadaan SDGs. Kaitan antara Program Lomba Desa dan Kelurahan dengan SDGs ada pada beberapa poin tujuan SDGs, diantaranya ada pada tujuan ke-1 yaitu (Menghapus Kemiskinan) yang masuk dalam bidang kemasyarakatan pada aspek penanggulangan kemiskinan, tujuan ke-3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) yang masuk dalam bidang kemasyarakatan pada aspek kesehatan, tujuan ke-4 (Pendidikan Bermutu) yang masuk dalam bidang

kemasyarakatan pada aspek pendidikan, tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) yang masuk pada bidang kemasyarakatan pada aspek ekonomi, tujuan ke-9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi) yang masuk dalam bidang kewilayahan pada aspek inovasi, dan tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat) yang masuk dalam bidang pemerintahan tepatnya aspek pemerintahan pada Program Lomba Desa dan Kelurahan.

Program Lomba Desa dan Kelurahan yang memiliki kaitan dengan tujuan SDGs yang menunjukkan bahwa masih banyaknya peristiwa yang dialami di berbagai negara di dunia. Peristiwa tersebut juga masih belum terselesaikan di Indonesia dan bahkan di Provinsi Sumatera Selatan seperti masih banyaknya penduduk yang mengalami kemiskinan, kesehatan yang kurang baik, kurangnya kesejahteraan, pendidikan yang kurang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang melemah, kurangnya infrastruktur dan inovasi, serta lemahnya kelembagaan pemerintahan yang menjadikan tujuan tersebut masih harus dibenahi hingga saat ini. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan melalui program lomba desa dan kelurahan berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di tingkat daerah. Dengan harapan nantinya permasalahan-permasalahan diatas dapat diselesaikan atau sedikitnya dapat mengurangi dampak dari permasalahan yang ada.

Adapun peristiwa yang sering dihadapi Desa dan Kelurahan dan berusaha di atasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yaitu pada Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan. Tiga poin tersebut menjadi poin utama yang selalu diharapkan Desa dan Kelurahan. Pada bidang

Pemerintahan misalnya, adakah bantuan keuangan untuk desa, adakah bimtek/sosialisasi/pelatihan terkait pemerintah desa, adakah bangunan gedung kantor desa atau kelurahan, apakah kantor desa atau kelurahan yang di bangun bersifat permanen atau semi permanen, apakah desa atau kelurahan memiliki balai desa (bagi desa) atau gedung pertemuan dalam rangka penguatan kelembagaan pemerintahan. Begitu pula dengan permasalahan pada bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan, apakah pemerintah desa atau kelurahan pernah melakukan fasilitasi mengenai batas desa atau kelurahan yang dilakukan diantara kecamatan, apakah desa dan kelurahan memiliki program keberpihakan terhadap masyarakat yang kurang mampu, dan masih banyak lagi.

Pada pembangunan Desa dan Kelurahan, salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah yaitu Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang diatur dalam Permendagri No. 81 Tahun 2015 melalui penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan yang dimaksud tidak hanya untuk mengetahui status dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, namun juga mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan tujuan dari Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel) adalah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan Desa dan Kelurahan dalam kurun waktu tertentu.

Lomba desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh 13 kabupaten yang diwakili oleh desa terpilih dari daerah masing-masing, serta diikuti oleh 4 kota yang diwakili oleh kelurahan dari daerah masing-masing. Adapun daftar

peserta lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan di lima tahun terakhir, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Kabupaten / Kota Peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

No.	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Banyuasin	Banyuasin	Pandemi Covid-19	Banyuasin	Banyuasin
2.	-	-		-	-
3.	-	Lahat		-	Lahat
4.	Muara Enim	Muara Enim		Muara Enim	Muara Enim
5.	Musi Banyuasin	Musi Banyuasin		Musi Banyuasin	Musi Banyuasin
6.	Musi Rawas	Musi Rawas		-	Musi Rawas
7.	-	Musi Rawas Utara		-	Musi Rawas Utara
8.	Ogan Ilir	-		-	-
9.	Ogan Komering Ilir	Ogan Komering Ilir		Ogan Komering Ilir	Ogan Komering Ilir
10.	Ogan Komering Ulu	Ogan Komering Ulu		Ogan Komering Ulu	Ogan Komering Ulu
11.	Ogan Komering Ulu Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan		-	Ogan Komering Ulu Selatan
12.	Ogan Komering Ulu Timur	Ogan Komering Ulu Timur		-	Ogan Komering Ulu Timur
13.	-	-		-	-
14.	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau		Lubuk Linggau	-
15.	-	Pagar Alam		-	Pagar Alam
16.	Palembang	Palembang		-	-
17.	Prabumulih	Prabumulih		-	-
Jumlah	12	14	-	6	11

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Program Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022

Pada tabel 2 menunjukkan daftar peserta kegiatan lomba desa dan kelurahan lima tahun terakhir di Provinsi Sumatera Selatan. Peserta lomba desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan sering kali Kabupaten ataupun Kota tidak ikut serta dalam kegiatan, hal ini seperti di tunjukkan di tabel 2 pada tahun 2018 terdapat 15 kabupaten/kota yang mengikuti kegiatan, sedangkan 2 kabupaten lainnya tidak mengikuti kegiatan. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 14 kabupaten/kota yang ikut serta dan 3 kabupaten/kota lainnya tidak mengikuti. Selanjutnya pada tahun 2020 kegiatan lomba desa dan kelurahan ditiadakan hal ini dikarenakan adanya bencana nonalam yaitu Pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 kegiatan lomba desa dan kelurahan kembali diselenggarakan, namun masih ada daerah yang tidak ikut serta sebanyak 7 kabupaten/kota. Pada tahun 2022 terdapat 2 daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang tidak mengikuti kegiatan lomba desa dan kelurahan.

Berdasarkan pada tabel 2 mengenai daftar peserta lomba desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan 3 juara umum dari desa maupun kelurahan serta 3 juara harapan untuk desa. Adapula daftar juara lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan di lima tahun terakhir, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Kabupaten / Kota Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Juara Desa					
Tahun / Juara	2018	2019	2020	2021	2022
Juara 1	Ogan Komering Ulu	Ogan Komering Ilir	Pandemi <i>Covid-19</i>	Ogan Komering Ulu	Ogan Komering Ulu Selatan
Juara 2	Musi Rawas	Muara Enim		Banyuasin	Ogan Komering Ulu Timur

Juara 3	Muara Enim	Ogan Komerling Ulu		Ogan Komerling Ilir	Musi Rawas Utara
Juara Harapan 1	Ogan Komerling Ilir	Musi Rawas		Muara Enim	Banyuasin
Juara Harapan 2	Musi Banyuasin	Musi Banyuasin		Musi Banyuasin	Ogan Komerling Ulu
Juara Harapan 3	Ogan Komerling Ulu Selatan	Banyuasin		-	Lahat
Juara Kelurahan					
Tahun / Juara	2018	2019	2020	2021	2022
Juara 1	Palembang	Lubuk Linggau	Pandemi Covid-19	Lubuk Linggau	Pagar Alam
Juara 2	Lubuk Linggau	Pagar Alam		-	-
Juara 3	Prabumulih	Prabumulih		-	-

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Program Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022

Pada tabel 3 menunjukkan juara lomba Desa dan Kelurahan dalam lima tahun terakhir di Provinsi Sumatera Selatan, juara dari perlombaan tersebut selalu mengalami perubahan yang menunjukkan betapa sengitnya kompetisi antar daerah namun pada tahun 2022 juara lomba desa dan kelurahan masih dalam proses kegiatan yang sedang berlangsung.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Dan Kelurahan Tahun 2021, 2021 dijelaskan bahwa terdapat Tim Penilai Provinsi yang terdiri dari :

1. Badan/Dinas/Biro yang menangani Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumsel;
2. Dinas/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait;
3. TP.PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Sumsel;

4. Praktisi/akademisi;

5. Unsur lainnya.

Namun yang menjadi pokok permasalahan pada pengelolaan program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan teori dari Stephen P. Robbins & Mary Coulter yaitu pada dimensi pengorganisasian (*Organizing*) tepatnya pada indikator pembagian tugas dan penempatan pegawai serta pada dimensi kepemimpinan (*Leading*) tepatnya pada indikator motivasi. Menurut Stephen P. Robbins & Mary Coulter dimensi pengorganisasian (*Organizing*) adalah sebuah tindakan penataan atau penyusunan strukturisasi pekerjaan untuk mencapai sasaran seperti pembagian tugas serta penempatan kerja sedangkan dimensi kepemimpinan (*Leading*) adalah sebuah interaksi dengan orang lain untuk mencapai sasaran seperti pemberian arahan, motivasi serta komunikasi antar individu.

Permasalahan pertama pada pengelolaan program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yaitu pembagian tugas dan penempatan pegawai. Sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021 sudah jelas bahwasannya tim penilai lomba desa dan kelurahan itu tidak hanya terdiri dari DPMD Provinsi Sumsel dan Tim Penggerak PKK saja, melainkan juga adanya dinas atau OPD lain yang juga ikut serta dalam tim penilai dalam program lomba desa dan kelurahan tersebut. Pada kenyataannya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.180/KPTS/DPMD/2019 tentang pembentukan Tim Penilai dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan di Provinsi Sumsel, tim penilai hanya dari pihak DPMD Provinsi Sumatera Selatan dan TP. PKK Provinsi Sumatera Selatan saja.

Padahal seharusnya dinas/OPD lain juga diikuti sertakan dalam tim penilaian lomba desa dan kelurahan. Hal ini dikarenakan penilaian pada program lomba desa dan kelurahan juga berkaitan dengan banyak pihak dari dinas/OPD lain yang semestinya juga dilibatkan yang sesuai dengan poin penilaian perlombaan. Permasalahan kedua adalah pada pemberian motivasi. Salah satu bentuk pemberian motivasi juga dapat berupa honorarium. Semua anggota tim penilai lomba desa dan kelurahan di Provinsi Sumsel tidak diberikannya honorarium agar motivasi para anggota tim penilai lebih semangat dalam bekerja, namun hanya diberikan uang perjalanan dinas.

Riset ini akan melengkapi hasil riset-riset penelitian sebelumnya tentang Program Lomba Desa dan Kelurahan yang lebih banyak menaruh perhatian pada aspek pemerintahan (Yana Sahyana, 2017; Annisa Aulia Putri, dkk, 2019; Jusniaty & Mursak, 2019; Syamsurizaldi, 2019), aspek lembaga kemasyarakatan (Ryan Anggria Pratama & Askarmin Harun, 2017), aspek inovasi (Rahmawati Ahfan, dkk, 2015), pemberdayaan kesejahteraan keluarga / PKK (Tony Pathony, 2019), aspek tanggap dan siaga bencana (Zulfikar Muhammad & Muhasim, 2020), aspek partisipasi masyarakat (Listyani Nur Baihati, 2021), serta aspek desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi / *E-Government* (Nur Inna Alfiah & Dwi Listia Rika Tini, 2022). Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek pemerintahan berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa seperti adanya kerjasama antar masyarakat dan swasta serta terselenggarakannya pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan partisipasi. Disamping itu, dilihat dari aspek lembaga kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa dan kelurahan melalui sistem pengawasan yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat dan membantu tugas kepala desa dan lurah dibidang pemberdayaan. Selain itu, jika dilihat dari aspek

inovasi, beberapa desa dan kelurahan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan inovasi desa seperti *pilot project* desa mandiri. Adapun aspek pemberdayaan kesejahteraan keluarga/PKK melalui penguatan, perlindungan, penyokongan dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian adapula aspek tanggap dan siaga bencana yang menjadi salah satu perhatian program lomba desa dan kelurahan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat khususnya yang berada di zona rawan bencana alam. Lalu pada aspek partisipasi masyarakat, masyarakat turut serta dan berperan aktif dalam melakukan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan skala prioritas masing-masing. Dan aspek desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi / *E-Government* yang dimanfaatkan oleh desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui penggunaan internet dan aplikasi. Tentunya, sebagian dari hasil riset penelitian sebelumnya bisa dihubungkan dengan pengelolaan program lomba desa dan kelurahan sebagai patokan pengelolaan lomba pada penelitian pengelolaan program lomba desa dan kelurahan.

Namun, dari hasil bacaan literatur yang telah penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu yang mengupas permasalahan pengelolaan program lomba desa dan kelurahan dari sisi fokus penelitian dengan penelitian terdahulu juga hampir sama yakni untuk melihat proses pemberdayaan masyarakat melalui program lomba desa dan kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kelurahan dengan menggunakan metode penelitian yang hampir sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, tetapi dari penelitian terdahulu juga ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu dari sisi teori manajemen menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter masih belum ada. Dengan demikian, riset ini

akan mengisi kekosongan riset sebelumnya terutama dalam mendeskripsikan pengelolaan program lomba desa dan kelurahan dengan menggunakan teori Stephen P. Robbins dan Mary Coulter.

1.2 Batasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan permasalahan agar tidak semakin meluasnya tema pada penelitian. Untuk mempermudah dan memahami penelitian yang akan diangkat yaitu dengan judul Analisis Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki batasan yang perlu diperhatikan yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan/manajemen program lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Sumsel dengan perspektif manajemen sektor publik, yang ditinjau dengan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen dari Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. Selain itu penelitian ini juga dibatasi oleh pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan pada masa pandemi *covid-19*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menentukan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam keilmuan serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada konsentrasi Manajemen Sektor Publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi dan evaluasi dalam Pengelolaan Program Lomba Desa dan Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan Program Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi serta dapat memberikan sedikit masukan dan evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahfan, R., Asrori, & Hotnir, S. (2015). IMPLIKASI JUARA LOMBA DESA PADA PERKEMBANGAN DESA. *Jurnal Bina Praja*, 7(4), 297–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.297-305>
- Alfiyah, N. I., & Tini, D. L. R. (2022). Inovasi pemerintah desa lobuk dalam mewujudkan desa mandiri dan berkelanjutan. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 17(1), 13–25.
- Anggraini, L., & Lisdiana, A. (2020). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Labuhan Mulya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. *Journal of Social Science Education*, 1(1), 1–10. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy/article/view/2137%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy/article/download/2137/1640>
- Baihati, L. N., Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.32669/village>
- Chairunnissa, C. (2017). *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Dalam Pendidikan dan Sosial*. Mitra Wacana Media. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, (2019).
- Kerangka Acuan Kerja (KAK), (2019).
- Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021, (2021).
- Haq, M. F. (2017). Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. *Evaluasi*, 1(1), 26–41.
- Jusniaty, & Mursak. (2019). Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 10(2), 95–105.

- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Deepublish.
https://perpustakaan.ung.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=35008
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Ketiga)*. Penerbit Gava Media.
- Menteri Dalam Negeri RI. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 83/PMK.02.2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, (2022).
- Muhammad, Z., & Muhasim. (2020). Pengaruh Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Terhadap Ketangguhan Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(1), 113–119.
<https://doi.org/10.26751/jikk.v1i1.768>
- Nugroho, A. S. (2018). *Sistem Informasi Manajemen*. Teknosain.
- Nur, S. (2014). Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Minat Belajar PKN Pada Peserta Didik Di SMA I Polewali. *Papatudzu*, 8(1), 62–81.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. In *International NGO Forum on Indonesian Development*.
- Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *IJD - International Journal of Demos*, 1(2), 262–289.
<https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.23>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2015).
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (2016).
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (2016).

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, (2016).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, (2019).
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 180/KPTS/DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 201, (2019).
- Pongtiku, A., & Kayame, R. (2019). *Metode Penelitian Tradisi Kualitatif* (A. Pongtiku (ed.)). Penerbit In Media.
- Pratama, R. A., & Harun, A. (2017). Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah. *Jurnal Trias Politika*, 1(2), 55–74. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1063>
- Putri, A. A., Ariany, R., & Syamsurizaldi. (2019). Sistem tata kelola pemerintahan nagari dalam menciptakan public value di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 102–116. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2432>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016a). *Manajemen Jilid 1* (A. Maulana, C. GPH, O. M. Dwiasri, & W. Hardani (eds.); 13th ed.). Erlangga.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016b). *Manajemen Jilid 2* (A. S. Nugroho, C. GPH, O. M. Dwiasri, S. Saat, & W. Hardani (eds.); 13th ed.). Erlangga.
- Sahyana, Y. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 157–181. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618>
- Siagian, S. P. (1989). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bina Aksara.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)). Nata Karya.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustakabarupress.
- Syamsurizaldi, Putri, A. A., & Antoni, S. (2019). Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 99–121.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen* (B. S. Fatmawati (ed.); Revisi). Bumi Aksara.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial* (R. Damayanti (ed.); 3rd ed.). Bumi Aksara.
- Wiriaatmadja, R. (2007). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Remaja Rosdakarya.